

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Manajerial, Growth Opportunity, dan Pensiun CEO Terhadap Konservatisme Akuntansi (The Effect of The Proportion of Independent Commissioners, Managerial Ownership Structure, Growth Opportunity, and CEO Retirement on Accounting Conservatism)

Jordan Bimandama^{1*}, Reni Oktavia², Liza Alvia³, Fajar Gustiawaty Dewi⁴
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung¹²³⁴
jordanbimandama@gmail.com^{1*}, reni.oktavia@feb.unila.ac.id², liza.alvia@feb.unila.ac.id³, fajargd@yahoo.com⁴

Abstract

Purpose: The purpose of this research is to examine and analyze the effect of the variable proportion of independent commissioners, managerial ownership structure, growth opportunity, and CEO retirement on accounting conservatism.

Research Methodology: The population in this research are State-Owned Enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-2019 period. Sampling used the saturated sampling method (census), where all population members were used as samples so that the number of pieces obtained was 20 enterprises. This research uses secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website and the company's official website in the form of annual reports. Data collection techniques are using the documentation method. Data analysis used multiple linear regression analysis with SPSS 20 as an analytical tool.

Results: The results obtained in this research indicate that the variables of the proportion of independent commissioners, managerial ownership structure, and growth opportunity do not affect accounting conservatism. In contrast, the CEO retirement variable has a significant negative effect on accounting conservatism.

Limitations: The limitations of this research are that the research sample used is limited, and the research period is relatively short. In addition, the accounting conservatism variable measurement method only uses accrual measures, and the four independent variables used have limited ability to explain the dependent variable because the Adjusted R Square (\overline{R}^2) value is only 11.4%.

Contribution: The results in this research can be used as a reference for further researchers and become one of the considerations for company management, investors, and creditors in making decisions.

Keywords: Accounting conservatism, proportion of independent commissioners, managerial ownership structure, growth opportunity, and CEO retirement.

1. Pendahuluan

Persaingan di antara para pelaku bisnis dapat dipicu karena adanya perkembangan usaha yang semakin pesat saat ini di mana dapat menimbulkan ketidakpastian kondisi ekonomi yang bisa terjadi di masa depan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan sehingga membuat setiap perusahaan memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda-beda sebagai bentuk pertahanan diri mereka terhadap ketidakpastian tersebut (Pangestuti, 2020). Segala bentuk kebijakan, regulasi, pengelolaan sumber daya, dan kinerja manajemen perusahaan tercermin dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban oleh manajer terhadap investor dalam mengelola sumber daya perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga mencerminkan kinerja manajemen selama satu periode (Marselina dan Sebrina, 2014). Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor, karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan mereka saat pengambilan keputusan (Annisa, 2018). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2015:3) tentang Penyajian Laporan Keuangan mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan,



kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna untuk sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Salah satu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi laba perusahaan. Laba digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian bagi pihak tertentu terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan dan digunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa depan. Oleh karena itu, manajemen sering kali melakukan tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan untuk memperoleh beberapa keuntungan secara pribadi (Sriwedari, 2012).

Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih dikarenakan lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil (Kieso *et al.*, 2019). Penggunaan dasar akrual tersebut memberikan kebebasan kepada pihak manajemen dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif metode ataupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan ketika menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing selama tidak menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Dengan adanya kebebasan tersebut, pihak manajemen dapat memanfaatkannya untuk membuat laporan keuangan menjadi berkualitas. Namun, pada praktiknya kebebasan tersebut sering disalahgunakan oleh manajer ketika menyajikan laporan keuangan, seperti memanipulasi angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga membuat laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, serta mengakibatkan kualitas informasi laporan keuangan diragukan yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan (Tazkiya dan Sulastiningsih, 2020).

Dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi pada lingkungan bisnis di masa depan dan mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi dalam penyajian laporan keuangan oleh pihak manajamen, perusahaan harus berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangannya. Prinsip kehatihatian ini sejalan dengan prinsip konservatisme dalam proses pelaporan keuangan. Prinsip konservatisme dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan agar meminimalisasi kemungkinan terjadinya pelaporan laba yang terlalu tinggi maupun kecurangan keuangan lainnya karena aktivitas perusahaan yang dipenuhi dengan ketidakpastian (Basu, 1997). Prinsip konservatisme diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membatasi dan mencegah optimisme manajer dan pemilik perusahaan yang berlebih, meningkatkan nilai perusahaan, mengurangi tuntutan hukum, dan memastikan perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba, serta segera mengakui kerugian dan hutang yang memiliki kemungkinan terjadi (Watts, 2003).

Prinsip konservatisme akuntansi masih menjadi perdebatan karena banyak kritik yang muncul terkait penerapan prinsip konservatisme, tetapi ada juga pihak yang mendukung diterapkannya prinsip tersebut (Mayangsari dan Wilopo, 2002). Alfian dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa apabila perusahaan menerapkan metode akuntansi yang sangat konservatif, informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut cenderung bias karena tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Disisi lain, Watts (2003) berpendapat bahwa prinsip konservatisme memiliki manfaat, yaitu menghindari manajer berperilaku oportunistik di mana manajer memiliki kontrak dengan perusahaan lain yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kinerja manajemen yang dapat memengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi dan keputusan terkait kesejahteraan manajemen sehingga kondisi ini dapat membuat manajemen melakukan manipulasi. Perilaku manajer yang optimis ini juga dapat memengaruhi nilai aset, nilai laba, dan pendapatan perusahaan yang akan melaporkan nilai yang berlebihan (overstated) sehingga prinsip konservatisme ini dapat menetralisasi sikap optimisme manajer. Namun, terlepas dari segala pro dan kontra yang meliputinya, prinsip konservatisme masih digunakan hingga saat ini. Menurut Noviantari dan Ratnadi (2015), prinsip konservatisme masih digunakan karena kecenderungan untuk melebih-lebihkan laba saat pelaporan keuangan di mana hal ini dapat diminimalisasi dengan menerapkan sikap pesimisme untuk mengimbangi sikap optimisme yang berlebih dari manajer. Selain itu, laba yang disajikan terlalu tinggi (overstatement) lebih berbahaya daripada laba yang disajikan rendah (understatement) karena risiko tuntutan hukum yang akan diperoleh lebih besar apabila menyajikan laporan keuangan yang jauh melebihi dari sebenarnya.

Contoh fenomena (kasus) manipulasi laporan keuangan yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang terdeteksi telah melakukan manipulasi atas penyajian laba. Pada tahun 2001, perusahaan telah menaikkan laba bersih tahunan dalam laporan keuangannya di mana



seharusnya disajikan senilai Rp99,594 miliar, tetapi dilaporkan dengan laba senilai Rp132 miliar. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memberikan penilaian bahwa penyajian laba tersebut dilaporkan secara berlebihan (*overstated*). Kasus lain juga terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2005 di mana perusahaan terdeteksi melakukan tindak kecurangan atas penyajian laporan keuangannya. Kondisi laporan keuangan perusahaan sebenarnya mengalami kerugian sebesar Rp63 miliar, tetapi dicatat dan dilaporkan sebagai keuntungan atau laba sebesar Rp6,9 miliar (bisnis.tempo.co).

Pada awal tahun 2019, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi sorotan publik karena dua komisarisnya, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, menyatakan *dissenting opinion* dan menolak untuk menandatangani laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas internet (*on board* Wi-Fi) dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) pada pos pendapatan. Pasalnya belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir tahun 2018, tetapi dalam laporan keuangan perusahaan berhasil membukukan laba bersih senilai USD809,85 ribu atau Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS) dan angka ini melonjak tajam daripada tahun 2017 di mana perusahaan mengalami kerugian sebesar USD216,58 juta. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan karena pada kuartal III 2018 perusahaan masih mengalami kerugian sebesar USD114,08 juta (cnnindonesia.com).

Chairul dan Dony mempertanyakan realisasi perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas internet (on board Wi-Fi) dalam penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dengan dua anak perusahaan Garuda, yaitu PT Citilink Indonesia dan PT Sriwijaya Air yang diteken pada 31 Oktober 2018. Melalui kesepakatan ini, Garuda Indonesia diklaim mendapatkan keuntungan hingga USD239,94 juta (sekitar Rp2,98 triliun) termasuk USD28 juta di antaranya adalah bagi hasil Garuda dengan PT Sriwijaya Air. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyebutkan bahwa kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) berlaku hingga 15 tahun dan kontrak disepakati karena Mahata berkomitmen untuk menyediakan layanan konektivitas internet (on board Wi-Fi) dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Dari nilai kontrak sebesar USD239,94 juta itu, Mahata ternyata baru membayar sebesar USD6,8 juta dan sisanya dicatat sebagai piutang lain-lain. Pencatatan itu yang kemudian membuat laporan keuangan Garuda Indonesia terlihat rapi (industri.kontan.co.id). Menurut Anggota Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Cris Kuntandi, menilai laporan manajemen Garuda yang mencatatkan transaksi 15 tahun dalam 1 tahun buku akuntansi adalah pelaporan yang tidak wajar. Dalam sistem pelaporan akuntansi yang wajar seharusnya nilai transaksi selama 15 tahun dibagi rata setiap tahunnya selama durasi kerja sama yang disepakati. Oleh karena itu, harus ada perbandingan yang seimbang antara pendapatan (revenue) dengan beban operasi (cost) di masing-masing tahun yang berarti pendapatan itu harus disebar selama 15 tahun lagi. Dengan demikian, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak bisa lagi mencatat uang masuk dari Mahata setiap tahunnya sebagai pendapatan (revenue) dalam laporan keuangan tahunan selama periode kerja sama dan hal ini berpotensi menimbulkan masalah keuangan pada Garuda di masa depan (beritagar.id).

Kasus lain terkait manipulasi laporan keuangan juga terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di awal Januari 2020. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, menjelaskan bahwa BPK telah melakukan dua kali investigasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sepanjang tahun 2010 hingga 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Jiwasraya pernah melakukan modifikasi laporan keuangan pada tahun 2006. Pembukuan yang seharusnya terhitung rugi, tetapi dimodifikasi sedemikian rupa menjadi laba. Meski sejak 2006 perusahaan masih laba, tetapi laba tersebut merupakan laba semu akibat rekayasa akuntansi atau *window dressing*. Hal ini menunjukkan adanya persoalan tekanan likuiditas di Jiwasraya yang telah berlangsung lama. Tidak hanya itu, BPK juga menilai adanya ketidakwajaran dalam pembukuan laba bersih sebesar Rp2,4 triliun yang dilakukan Jiwasraya pada 2017. Laba bersih tersebut dinilai BPK terdapat kecurangan pencadangan sebesar Rp7,7 triliun sehingga jika pencadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka perusahaan seharusnya menderita kerugian. Pada tahun 2018, Jiwasraya tercatat membukukan kerugian sebesar Rp15,3 triliun hingga akhir September 2019 diperkirakan rugi sebesar Rp13,7 triliun. Kondisi memburuk hingga November 2019 di mana keuangan perusahaan dinyatakan negatif sebesar Rp27,2 triliun (cnnindonesia.com).

Kasus di atas mengindikasikan rendahnya penerapan prinsip konservatisme yang terjadi pada beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Beberapa perusahaan tersebut telah mencatat laba atau pendapatan terlalu tinggi



(overstated) sehingga membuat laba yang dilaporkan menjadi tidak sesuai dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan saat pengambilan keputusan. Maraknya kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2016-2019 di mana setidaknya telah terjadi dua kasus manipulasi laporan keuangan, yaitu pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga membuat peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah perusahaan BUMN cenderung menerapkan akuntansi optimis dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kasus yang terjadi tersebut secara tidak langsung mendukung pemikiran bahwa pentingnya menerapkan prinsip konservatisme akuntansi pada perusahaan BUMN. Dengan diterapkannya prinsip konservatisme tersebut diharapkan dapat menetralisasi sikap optimisme manajer yang berlebih sehingga menghasilkan laporan keuangan yang pesimis atau konservatif.

Berdasarkan pendapat para peneliti terdahulu terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi penerapan prinsip konservatisme akuntansi pada saat menyajikan laporan keuangan perusahaan di antaranya proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan manajerial, growth opportunity, dan pensiun CEO. Faktor pertama adalah proporsi dewan komisaris independen. Menurut Wardhani (2008), komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dewan komisaris lainnya, dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan. Salah satu fungsi utama dewan komisaris independen adalah menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi pengawasannya. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris perusahaan, maka semakin besar pula tingkat konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran pasar.

Faktor kedua adalah struktur kepemilikan manajerial. Struktur kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rohim dan Puspita, 2014). Widayati (2011) menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial mencerminkan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham yang ada dalam perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. N. K. S. L. Dewi dan Suryanawa (2014) menyimpulkan bahwa perusahaan akan semakin menerapkan prinsip akuntansi yang konservatif apabila kepemilikan saham yang dimiliki manajemen lebih besar. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak hanya mementingkan laba yang tinggi, tetapi lebih memprioritaskan kontinuitas perusahaan dalam jangka panjang.

Faktor ketiga adalah *growth opportunity*. *Growth opportunity* merupakan kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Perusahaan untuk tumbuh dan berkembang membutuhkan peluang dan kesempatan. Semakin tinggi kesempatan bertumbuh perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan. Besarnya dana yang dibutuhkan perusahaan menyebabkan manajer menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dengan cara meminimalkan laba agar pembiayaan untuk investasi dapat terpenuhi (Fatmariani, 2013). Perusahaan yang menggunakan prinsip konservatisme akuntansi dalam laporan keuangannya identik dengan perusahaan yang tumbuh. Hal ini dikarenakan terdapat cadangan dana tersembunyi pada perusahaan tersebut yang digunakan untuk melakukan investasi atau memperbesar perusahaan (Mayangsari dan Wilopo, 2002).

Faktor keempat adalah pensiun CEO. Pada penelitian ini, pensiun CEO yang dimaksud merupakan pejabat eksekutif tertinggi dalam suatu perusahaan dimana usianya telah mendekati masa pensiun dari jabatan eksekutifnya. Penggunaan variabel pensiun CEO dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Chen et al. (2018) dan Tazkiya dan Sulastiningsih (2020) yang menyatakan bahwa Chief Executive Officer (CEO) yang mendekati masa pensiun dari jabatannya akan cenderung kurang berhatihati dalam pelaporan keuangannya, seperti melebih-lebihkan penjualan kredit dan mengecilkan biaya yang harus dibayar sehingga akan menghasilkan laba atau pendapatan yang tinggi dan bonus yang akan mereka dapatkan semakin tinggi pula. Selain itu, CEO juga akan memanipulasi laba untuk meningkatkan kinerja jangka pendek sebelum mereka diberhentikan dari perusahaan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2018) dan Tazkiya dan Sulastiningsih (2020) secara bersamaan menyimpulkan bahwa pensiun CEO berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.



Berdasarkan hasil riset sebelumnya yang menguji tentang pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap konservatisme akuntansi masih banyak menunjukkan inkonsistensi hasil. Penelitian oleh Yunos et al. (2014), Pratanda dan Kusmuriyanto (2014), N. H. S. Dewi dan Putra (2016), dan Nasr dan Ntim (2018) menunjukkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Berbeda halnya dengan penelitian oleh Amran dan Manaf (2014) menunjukkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, serta penelitian oleh Ahmed dan Duellman (2007), Padmawati dan Fachrurrozie (2015), dan Liyanto dan Hairul Anam (2017) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Selain itu, penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi juga masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) dan Pambudi (2017) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan penelitian oleh Fatmariani (2013), D. N. Sari et al. (2014), dan Ayuningsih et al. (2016) menunjukkan struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi, serta penelitian oleh El-Haq et al. (2019) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga terdapat pada penelitian tentang pengaruh growth opportunity terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian oleh Fatmariani (2013), Alfian dan Sabeni (2013), Verawaty dan Merina (2015), Agustina et al. (2016), dan Tazkiya dan Sulastiningsih (2020) menunjukkan bahwa growth opportunity berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan penelitian oleh Febrianti (2018) menunjukkan growth opportunity berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi, serta penelitian oleh Astarini (2011), L. P. K. Dewi et al. (2014), Fathurahmi et al. (2014), Ayuningsih et al. (2016), dan Savitri (2016) menunjukkan bahwa growth opportunity tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Kemudian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tazkiya dan Sulastiningsih (2020). Meskipun telah menggunakan proksi yang sama dalam mengukur variabel pensiun CEO, tetapi terdapat perbedaan pada saat pengolahan data. Pada penelitian Tazkiya dan Sulastiningsih (2020), mereka secara sekaligus langsung menetapkan apakah CEO telah mendekati masa pensiun atau tidak selama periode penelitian hanya dilihat berdasarkan usia CEO pada tahun dasar yang ditetapkan saja, tetapi tidak melihat pada tahun-tahun sebelumnya yang mungkin saja terdapat perbedaan CEO dimana usianya telah atau belum mendekati masa pensiun, sedangkan pada penelitian ini ketika akan menetapkan apakah CEO telah mendekati masa pensiun atau tidak didasarkan pada usia CEO di setiap masing-masing tahun atau periode penelitian sehingga hasil penelitian yang diperoleh sesuai dan tidak bias. Dengan adanya variabel ini, penulis ingin mengetahui apakah keberadaan dan kepensiunan CEO berpengaruh terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Selain itu, penelitian mengenai pengaruh pensiun CEO terhadap konservatisme akuntansi masih jarang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih banyak menunjukkan inkonsistensi hasil di antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan maraknya fenomena (kasus) manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Manajerial, *Growth Opportunity*, dan Pensiun CEO Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)."

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi adalah hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih pemegang saham (*principal*) mengontrak orang lain atau manajer (*agent*) untuk mengelola sumber daya perusahaan. Pemegang saham menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasional perusahaan, sedangkan manajer berkewajiban untuk mengelola sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab atas semua pekerjaannya sebagaimana yang dipercayakan oleh pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Teori keagenan muncul disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pihak pemegang saham menginginkan laba yang



seolah tidak tampak besar untuk menghindari pajak yang terlalu tinggi dan dana yang diinvestasikan dapat memberikan pendapatan (return) yang maksimal, sedangkan pihak manajer menginginkan laba perusahaan seolah terlihat besar sehingga kinerja manajer dinilai baik oleh pemegang saham dan manajer menginginkan insentif atas pengelolaan dana pemilik perusahaan (Oktomegah, 2012). Perbedaan tujuan dan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini dapat mengarah pada kondisi yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana manajer sebagai pihak pengelola perusahaan memiliki informasi lebih banyak terkait perusahaan dibandingkan para pemegang saham. Hal ini disebabkan karena tiap individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri sehingga mendorong manajer untuk menyembunyikan informasi dari pemegang saham. Dengan begitu, besar kemungkinan bagi manajer untuk memanipulasi angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa sepengetahuan para pemegang saham. Lafond dan Roychowdhury (2008) berpendapat bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengurangi kemungkinan tindakan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan dan biaya agensi yang muncul akibat adanya asimetri informasi.

2.2. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi adalah tindakan kehati-hatian dalam pembuatan laporan keuangan yang diimplikasikan dengan mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang meskipun kemungkinan terjadinya besar sehingga mengakibatkan nilai aktiva bersih yang *understatement* secara persisten di mana laba yang dilaporkan dan aset bersih yang dicapai melalui penilaian aset yang lebih rendah, penilaian kewajiban yang lebih tinggi, pengakuan laba dan keuntungan yang lebih lambat, dan pengakuan biaya serta kerugian yang lebih lambat (Padmawati dan Fachrurrozie, 2015).

Akuntansi yang konservatif berarti akuntan bersikap pesimis dalam menghadapi ketidakpastian laba atau rugi dengan menggunakan prinsip memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan biaya, merendahkan penilaian aset, dan meninggikan penilaian hutang (Zelmiyanti, 2014). Oleh karena itu, konservatif merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melaporkan laporan keuangannya di mana akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan dan pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah mengadopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 menyebutkan ada beberapa metode yang menerapkan prinsip konservatisme:

- 1. PSAK Nomor 14 tentang persediaan yang berkaitan dengan pemilihan perhitungan biaya persediaan.
- 2. PSAK Nomor 16 tentang aset tetap dan aset lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aset tetap.
- 3. PSAK Nomor 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi.

Konservatisme akuntansi dalam penelitian ini diukur menggunakan earnings/accrual measures yang diadaptasi dari model Givoly dan Hayn (2002) di mana variabel ini diproksikan dengan nonoperating accrual. Model tersebut memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Givoly dan Hayn (2000) berpendapat bahwa konservatisme akan menghasilkan akrual yang negatif secara terus-menerus di mana akrual yang dimaksud adalah selisih antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dengan arus kas dari aktivitas operasi. Apabila laba bersih yang dihasilkan lebih rendah daripada arus kas dari aktivitas operasi mengindikasikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip konservatisme yang menyebabkan akrual menjadi negatif. Semakin besar akrual negatif, maka akan semakin konservatif praktik akuntansi yang diterapkan. Hal ini sesuai dengan prinsip konservatisme akuntansi di mana perusahaan mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan akan terjadi, tetapi menunda pengakuan pendapatan atau laba yang akan datang meskipun kemungkinan terjadinya besar.

Dasar penggunaan akrual sebagai proksi konservatisme akuntansi karena rugi akan cenderung tercakup sepenuhnya dalam nilai akrual, sedangkan laba tidak sehingga akrual secara periodik akan cenderung bernilai negatif dan nilai akrual secara akumulasi cenderung *understated*. Akibatnya, nilai akrual periodik bersih yang bernilai negatif dan nilai kumulatif akrual negatif yang diakumulasikan sepanjang periode dapat digunakan sebagai ukuran konservatisme (Savitri, 2016). Alasan ukuran akrual dipilih dikarenakan lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil (Kieso *et al.*, 2019). Selain itu, *non-operating accrual* digunakan untuk menentukan besarnya



tingkat konservatisme karena adanya hubungan positif signifikan antara akumulatif negatif *non-operating accrual* terhadap kenaikan penggunaan metode konservatisme pada perusahaan di US tahun 1980 (Seswanto, 2012). Dengan demikian, proksi konservatisme akuntansi dihitung dengan menggunakan rumus *non-operating accrual* sebagai berikut.

$$NOACC_{it} = \frac{TACC_{it} - OACC_{it}}{TA_{it}}$$

Di mana:

 $TACC_{it}$ = $(NI_{it} + DEP_{it}) - CFO_{it}$

 $OACC_{it} = \Delta ARE_{it} + \Delta INV_{it} + \Delta PEX_{it} - \Delta APA_{it} - \Delta AEX_{it} - \Delta TPA_{it}$

Keterangan:

NOACC_{it} : *Non-operating accrual* perusahaan i pada tahun t.

TACC_{it} : *Total accrual* (sebelum depresiasi) perusahaan i pada tahun t.

OACC_{it} : Operating accrual perusahaan i pada tahun t.

TA_{it}: Total aset perusahaan i pada tahun t.

 $\begin{array}{lll} NI_{it} & : Laba \ bersih \ setelah \ pajak \ perusahaan \ i \ pada \ tahun \ t. \\ DEP_{it} & : Beban \ penyusutan \ aset \ tetap \ perusahaan \ i \ pada \ tahun \ t. \\ CFO_{it} & : Arus \ kas \ dari \ aktivitas \ operasi \ perusahaan \ i \ pada \ tahun \ t. \\ \Delta ARE_{it} & : Perubahan \ piutang \ usaha \ perusahaan \ i \ pada \ tahun \ t. \\ \Delta INV_{it} & : Perubahan \ persediaan \ perusahaan \ i \ pada \ tahun \ t. \\ \end{array}$

 ΔPEX_{it} : Perubahan biaya dibayar dimuka perusahaan i pada tahun t.

 ΔAPA_{it} : Perubahan hutang usaha perusahaan i pada tahun t. ΔAEX_{it} : Perubahan beban akrual perusahaan i pada tahun t. ΔTPA_{it} : Perubahan hutang pajak perusahaan i pada tahun t.

2.3. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2008). Salah satu fungsi utama dewan komisaris independen adalah menjalankan fungsi pengawasan (monitoring) yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi pengawasannya (Wardhani, 2008). Semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan menunjukkan dewan komisaris yang kuat sehingga semakin tinggi pula tingkat konservatisme yang diinginkan karena adanya persyaratan informasi keuangan yang lebih berkualitas. Apabila proporsi dewan komisaris independen lebih sedikit, fungsi pengawasan yang dilakukan akan lemah sehingga manajer perusahaan akan memiliki kesempatan untuk menggunakan prinsip akuntansi yang agresif dan kurang konservatif (Ahmed dan Duellman, 2007). Dengan adanya dewan komisaris independen, fungsi pengawasan yang dilakukan akan menjadi lebih ketat sehingga cenderung mensyaratkan akuntansi yang konservatif untuk mencegah sikap oportunistik manajer (Padmawati dan Fachrurrozie, 2015). Independensi dewan memiliki peran penting dalam meningkatkan integritas dan kredibilitas laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh perusahaan sehingga menghasilkan pelaporan yang konservatif (Yunos et al., 2014).

Proporsi dewan komisaris independen diukur berdasarkan persentase antara jumlah dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris perusahaan (Djuitaningsih dan Marsyah, 2012). Dengan demikian, proksi proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$KOM_IND = \frac{Jumlah \ Komisaris \ Independen}{Jumlah \ Komisaris} x \ 100\%$$



2.4. Struktur Kepemilikan Manajerial

M. R. Sari dan Rahayu (2014) berpendapat bahwa kepemilikan saham oleh orang dalam atau pihak manajerial merupakan suatu mekanisme agar pihak pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan perusahaan karena terdapat kepemilikan manajemen secara pribadi atas saham perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) juga menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, aktivitas dan keputusan yang diambil akan diselaraskan dengan kepentingan manajemen yang sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka manajemen tidak hanya sekedar menjadi agen saja, tetapi juga sebagai pemilik perusahaan.

Kepemilikan manajerial dapat membuat manajemen tidak melaporkan laba secara berlebihan (*overstated*) karena rasa kepemilikan terhadap perusahaan. Selain itu, motif bonus atau manajemen laba dengan cara *income maximization* yang ingin dilakukan oleh manajemen menjadi berkurang sehingga pelaporan laba cenderung rendah. Hal ini dilakukan atas dasar manajemen ingin memperbesar perusahaan dengan menggunakan cadangan dana tersembunyi dari hasil pelaporan laba yang tidak *overstated*. Aset diakui dengan nilai terendah akan menyebabkan peningkatan nilai perusahaan dimana nilai pasar akan lebih besar daripada nilai buku sehingga dapat membuat calon investor dan investor menilai perusahaan secara positif dan akan tertarik berinvestasi pada perusahaan tersebut (Mayangsari dan Wilopo, 2002).

Struktur kepemilikan manajerial merupakan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insiders*) terhadap jumlah saham yang dimiliki investor atau jumlah saham beredar (Sugiarto, 2009). Adapun jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam meliputi saham yang dimiliki oleh direksi, dewan komisaris, dan manajer. Dengan demikian, proksi struktur kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$KEP_MAN = \frac{Jumlah Saham Manajerial}{Jumlah Saham Beredar} x 100\%$$

2.5. Growth Opportunity

Growth opportunity adalah kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Perusahaan untuk tumbuh dan berkembang membutuhkan peluang dan kesempatan. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan dana untuk menyeimbangkan pendapatan dan penggunaan hutang bagi perusahaan yang merupakan tantangan bagi manajer. Semakin tinggi kesempatan bertumbuh perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan. Besarnya dana yang dibutuhkan perusahaan menyebabkan manajer menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dengan cara meminimalkan laba agar pembiayaan untuk investasi dapat terpenuhi (Fatmariani, 2013).

Perusahaan yang menggunakan prinsip konservatisme akuntansi dalam laporan keuangannya identik dengan perusahaan yang tumbuh. Hal ini dikarenakan terdapat cadangan dana tersembunyi pada perusahaan tersebut yang digunakan untuk melakukan investasi atau memperbesar perusahaan. Dengan adanya pertumbuhan ini, pasar dan investor akan merespon secara positif terhadap perusahaan karena adanya *goodwill*. *Goodwill* tercipta karena pada perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme akuntansi mengakibatkan nilai pasar akan lebih besar daripada nilai bukunya yang membuat pasar akan menilai secara positif atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang diharapkan akan terjadi kenaikan arus kas di masa depan (Mayangsari dan Wilopo, 2002). Menurut Fathurahmi *et al.* (2014), perusahaan yang dapat menarik calon investor untuk menanamkan modal dan saham yang beredar diminati oleh para pembeli saham dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Apabila banyak calon investor yang akan berinvestasi, perusahaan akan memperoleh dana untuk mengembangkan perusahaannya.

Growth opportunity diproksikan menggunakan rasio market to book value of equity. Rasio ini menunjukkan besarnya perbandingan antara nilai pasar saham terhadap total ekuitas perusahaan dan mencerminkan pasar yang menilai return dari investasi perusahaan di masa depan akan lebih besar daripada return yang diharapkan dari ekuitasnya (Fatmariani, 2013). Selain itu, Barclay dan Smith (1995) juga menyatakan bahwa rasio market to book value of equity dapat mencerminkan potensi nilai perusahaan di masa depan. Rasio ini mencerminkan seberapa besar pasar menilai perusahaan dapat memanfaatkan modalnya dalam menjalankan kegiatan usaha untuk memenuhi tujuan perusahaan.



Dengan demikian, proksi growth opportunity dihitung dengan menggunakan rumus rasio market to book value of equity (MBVE) sebagai berikut.

 $GROWTH = \frac{\text{Jumlah Saham Beredar x Harga Penutupan Saham}}{\text{Total Ekuitas}}$

2.6. Pensiun CEO

Chief Executive Officer (CEO) atau direktur utama merupakan posisi tertinggi dalam jajaran eksekutif yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan. Investor dapat menilai perusahaan hanya dengan mengetahui CEO perusahaan tersebut (Certo et al., 2007). Selain itu, CEO juga berfungsi sebagai penghubung antara pihak internal dan eksternal perusahaan serta kesuksesan suatu perusahaan sangat berkaitan dengan peran CEO (Sudana dan Aristina, 2017). Pensiun CEO dalam penelitian ini merupakan pejabat eksekutif tertinggi dalam suatu perusahaan dimana usianya telah mendekati masa pensiun dari jabatan eksekutifnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang antara lain mengatur tentang direksi, pada dasarnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang batas usia maksimal seseorang dapat diangkat sebagai direksi, tetapi yang diatur adalah soal persyaratan pengangkatan direksi dalam jangka waktu tertentu dan larangan pengangkatan direksi tanpa batas waktu yang bertujuan untuk menghindari faktor kejenuhan dari direksi itu sendiri, seperti yang tertuang dalam Pasal 94 Ayat 3 dengan penjelasan sebagai berikut.

"Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS."

Dasar yang digunakan untuk mengetahui apakah CEO telah mendekati masa pensiun atau tidak menggunakan asumsi usia yang dapat dilihat pada laporan tahunan perusahaan. Pada penelitian ini, ketentuan batas usia yang digunakan untuk mengukur apakah CEO telah mendekati masa pensiun atau tidak mengacu pada penelitian Tazkiya dan Sulastiningsih (2020), yaitu menggunakan ketentuan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 349 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan penjelasan sebagai berikut.

"Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun, dikecualikan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional."

Variabel pensiun CEO dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan variabel *dummy* yang memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Diberi angka 0 jika CEO tidak mendekati masa pensiun di mana usianya kurang dari 55 tahun (usia < 55) dan diberi angka 1 jika CEO mendekati masa pensiun di mana usianya lebih dari atau sama dengan 55 tahun (usia \ge 55).

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Konservatisme Akuntansi

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2008). Keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dinilai sangat penting terhadap pengawasan kinerja manajemen karena komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris perusahaan lainnya yang tercatat sehingga aktivitas pengawasan yang dilakukan akan membuat laporan keuangan perusahaan dinilai lebih berkualitas.

Salah satu fungsi utama dewan komisaris independen adalah menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi pengawasannya (Wardhani, 2008). Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat konservatisme yang diinginkan karena adanya persyaratan informasi keuangan yang lebih berkualitas. Sebaliknya, apabila proporsi



dewan komisaris independen rendah, aktivitas pengawasan yang dilakukan akan lemah sehingga membuat manajemen memiliki kesempatan untuk menggunakan prinsip akuntansi yang agresif dan kurang konservatif (Limantauw, 2012).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yunos *et al.* (2014), N. H. S. Dewi dan Putra (2016), dan Nasr dan Ntim (2018) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki hubungan positif terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris perusahaan, maka semakin besar pula tingkat konservatisme akuntansi yang akan diterapkan sehingga aktivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen menjadi lebih kuat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi.

2.7.2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Konservatisme Akuntansi

Struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor internal perusahaan yang menentukan kemajuan perusahaan. Menurut Wardhani (2008), kepemilikan manajerial adalah jumlah saham perusahaan-perusahaan publik yang dimiliki oleh individu-individu atau kelompok elit yang berasal dari dalam perusahaan yang memiliki kepentingan langsung terhadap perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen dapat menurunkan permasalahan agensi karena semakin besar saham yang dimiliki oleh manajemen, maka semakin besar motivasi mereka dalam bekerja untuk meningkatkan nilai saham perusahaan.

Kepemilikan saham oleh *inside directors* dan manajemen ini dapat berperan sebagai fungsi pengawasan dalam proses pelaporan keuangan dan juga dapat menjadi faktor pendorong dilakukannya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Apabila *inside directors* dan manajemen menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, maka akan mensyaratkan informasi pelaporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi sehingga mereka akan menuntut penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi pula. Namun, apabila kepemilikan mereka tersebut justru mendorong dilakukannya ekspropriasi terhadap perusahaan, maka mereka akan lebih cenderung untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif (Wardhani, 2008). Pambudi (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial atas saham yang tinggi dalam perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan pencatatan laporan keuangan secara konservatif. Manajemen dengan kontrol kepemilikan besar memiliki inisiatif yang lebih rendah untuk melakukan *self-serving behavior* yang tidak meningkatkan nilai perusahaan dan cenderung menerapkan kebijakan akuntansi yang konservatif. Perasaan memiliki manajer terhadap suatu perusahaan membuat manajer tidak hanya memikirkan bonus yang akan didapatkan apabila labanya tinggi, tetapi manajer lebih mementingkan kontinuitas perusahaan dalam jangka panjang sehingga manajer tertarik untuk mengembangkan perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) dan Pambudi (2017), struktur kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa jika manajer memiliki kepemilikan saham yang besar dalam suatu perusahaan, maka manajer akan melaporkan laba secara konservatif. Hal ini dikarenakan adanya rasa memiliki manajer terhadap perusahaan cenderung lebih besar sehingga membuat manajer berkeinginan untuk memperbesar perusahaan dengan menggunakan cadangan dana tersembunyi dari hasil pelaporan laba yang tidak *overstated* yang dapat meningkatkan jumlah investasi. Nilai pasar akan lebih besar daripada nilai buku karena nilai aset diakui dengan nilai terendah sehingga pasar dan investor akan menilai secara positif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂: Struktur Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi.



2.7.3. Pengaruh Growth Opportunity Terhadap Konservatisme Akuntansi

Growth opportunity adalah kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Perusahaan untuk tumbuh dan berkembang membutuhkan peluang dan kesempatan. Semakin tinggi kesempatan bertumbuh perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan. Besarnya dana yang dibutuhkan perusahaan menyebabkan manajer menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dengan cara meminimalkan laba agar pembiayaan untuk investasi dapat terpenuhi (Fatmariani, 2013).

Perusahaan yang menggunakan prinsip konservatisme akuntansi dalam laporan keuangannya identik dengan perusahaan yang tumbuh. Hal ini dikarenakan terdapat cadangan dana tersembunyi pada perusahaan tersebut yang digunakan untuk melakukan investasi atau memperbesar perusahaan. Dengan adanya pertumbuhan ini, pasar dan investor akan merespon secara positif terhadap perusahaan karena adanya *goodwill*. *Goodwill* tercipta karena pada perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme akuntansi mengakibatkan nilai pasar akan lebih besar daripada nilai bukunya yang membuat pasar akan menilai secara positif atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang diharapkan akan terjadi kenaikan arus kas di masa depan (Mayangsari dan Wilopo, 2002). Ohlson dan Feltham (1995) dalam Alfian dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa akuntansi konservatif merupakan konsep yang sesuai karena menunjukkan pertumbuhan suatu perusahaan di mana aset neto yang dilaporkan lebih rendah daripada nilai pasar.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fatmariani (2013), Alfian dan Sabeni (2013), dan Verawaty dan Merina (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara *growth opportunity* terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Agustina *et al.* (2016) dan Tazkiya dan Sulastiningsih (2020) yang menyatakan bahwa *growth opportunity* berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃: Growth Opportunity Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi.

2.7.4. Pengaruh Pensiun CEO Terhadap Konservatisme Akuntansi

Chen et al. (2018) dalam Tazkiya dan Sulastiningsih (2020) menemukan bukti bahwa meningkatnya daya tawar kreditur bersamaan dengan perubahan dalam penggunaan ketentuan kontrak memungkinkan kreditur untuk mempertahankan CEO yang terampil dengan pengetahuan spesifik terhadap perusahaan dan memberikan mereka insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2018), Chief Executive Officer (CEO) akan cenderung memanipulasi laba untuk meningkatkan kinerja jangka pendek perusahaan sebelum mereka diberhentikan dari perusahaan atau saat mendekati masa pensiun dari jabatan eksekutifnya. Hal ini berarti bahwa semakin CEO mendekati masa pensiun dari jabatannya, maka tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangannya akan semakin rendah. CEO akan menaikkan pendapatan dan mengurangi biaya agar bonus yang diterima semakin tinggi dan laba yang dihasilkan tinggi (overstated) sehingga kinerja mereka akan dinilai baik oleh perusahaan. Dengan kata lain, apabila kinerja manajemen perusahaan buruk, CEO akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan dari jabatan eksekutifnya. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2018) menyimpulkan bahwa pensiun CEO berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Tazkiya dan Sulastiningsih (2020) yang menyatakan bahwa pensiun CEO berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini dikarenakan CEO yang usianya telah mendekati masa pensiun dari jabatannya akan cenderung menaikkan laba agar bonus yang mereka dapatkan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₄: Pensiun CEO Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi.

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019 sebanyak 20 perusahaan.



3.2. Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh (sensus), yaitu teknik penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan jumlah populasinya relatif kecil, yaitu kurang dari 30 sampel (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, seluruh populasi sebanyak 20 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019 digunakan sebagai sampel. Daftar sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Sampel Penelitian

No.	Kode Emiten	Nama Perusahaan	
1.	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	
2.	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	
3.	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
4.	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
5.	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
6.	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
7.	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	
8.	INAF	PT Indofarma (Persero) Tbk	
9.	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	
10.	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	
11.	KRAS	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	
12.	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	
13.	PTBA	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	
14.	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	
15.	SMBR	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	
16.	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	
17.	TINS	PT Timah (Persero) Tbk	
18.	TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	
19.	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	
20.	WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	

Sumber: Data diolah, 2021.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui variabel-variabel penelitian dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis melalui pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder di mana sumber data tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya, tetapi melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentar) yang dipublikasikan secara umum maupun tidak dan diperoleh dari objek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2016). Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019 yang diperoleh dari situs web Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan situs web resmi milik perusahaan.



3.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengunduh laporan tahunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan situs web resmi milik perusahaan.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki serta tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data yang disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness/kemencengan distribusi (Ghozali, 2016).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda yang digunakan dalam suatu penelitian telah layak. Menurut Ghozali (2016), suatu model regresi linear berganda yang digunakan untuk melakukan penelitian dan menguji hipotesis harus memenuhi asumsi klasik yang bertujuan untuk menghindari adanya estimasi yang bias karena tidak semua data dapat menerapkan model regresi linear berganda.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa dalam model regresi berganda tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi serta memastikan data yang dihasilkan terdistribusi normal. Jika persamaan model regresi linear berganda telah memenuhi persyaratan teoritis statistik berarti persamaan model yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan *Software* SPSS 20 untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda.

Penggunaan regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sehingga dapat membedakan kedua variabel dalam penelitian (Ghozali, 2016). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

$KSV_AKT = \alpha + \beta_1 KOM IND + \beta_2 KEP MAN + \beta_3 GROWTH + \beta_4 PEN_CEO + \varepsilon$

Keterangan:

KSV AKT : Konservatisme Akuntansi.

 $\alpha \hspace{1.5cm} : Konstanta.$

 $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Regresi.

KOM_IND : Proporsi Dewan Komisaris Independen.

KEP_MAN : Struktur Kepemilikan Manajerial.

GROWTH : Growth Opportunity.

PEN_CEO : Pensiun CEO. ε : Error Term.

3.5.4. Uji Hipotesis

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen yang bertujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata



populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam melakukan taksiran nilai aktual dapat diukur dari $goodness\ of\ fit$. Secara statistik, setidaknya hal ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik dikatakan signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima (Ghozali, 2016).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
KSV_AKT	80	-,0950	,6596	,142030	,1404102	
KOM_IND	80	20,0000	71,4286	40,610101	10,3908507	
KEP_MAN	80	,0000	,0569	,004701	,0086121	
GROWTH	80	,2983	5,7242	1,754185	1,1166818	
PEN_CEO	80	0	1	,46	,502	
Valid N (listwise)	80					

Sumber: Data Olahan SPSS 20.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah observasi (N) pada tabel sebanyak 80. Dari keseluruhan observasi yang dilakukan terhadap sampel yang ada diperoleh bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen (KOM_IND) memiliki nilai minimum atau nilai terendah sebesar 20,0000 yang dimiliki oleh PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, sedangkan nilai maksimum atau nilai tertinggi sebesar 71,4286 yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) proporsi dewan komisaris independen sebesar 40,610101 yang berarti perusahaan sampel memiliki rata-rata proporsi dewan komisaris independen sebesar 40,610101% di mana jumlah ini telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh OJK bahwa persentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris dan nilai standar deviasi sebesar 10,3908507 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel proporsi dewan komisaris independen sebesar 10,3908507 dari 80 jumlah observasi (N) yang digunakan.

Variabel struktur kepemilikan manajerial (KEP_MAN) memiliki nilai minimum atau nilai terendah sebesar 0,0000 yang dimiliki oleh beberapa perusahaan di antaranya PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sedangkan nilai maksimum atau nilai tertinggi sebesar 0,0569 yang dimiliki oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) struktur kepemilikan manajerial sebesar 0,004701 yang berarti rata-rata saham yang dimiliki oleh pihak manajerial atau orang dalam (*insiders*) perusahaan sebesar 0,004701% dari jumlah saham secara keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan dan nilai standar deviasi sebesar 0,0086121 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel struktur kepemilikan manajerial sebesar 0,0086121 dari 80 jumlah observasi (N) yang digunakan.

Pada variabel *growth opportunity* (GROWTH) memiliki nilai minimum atau nilai terendah sebesar 0,2983 yang dimiliki oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, sedangkan nilai maksimum atau nilai tertinggi sebesar 5,7242 yang dimiliki oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) *growth opportunity* sebesar 1,754185 yang berarti perusahaan sampel memiliki rata-rata kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebesar 1,754185% dan nilai standar deviasi sebesar 1,1166818 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel *growth opportunity* sebesar 1,1166818 dari 80 jumlah observasi (N) yang digunakan.

Variabel pensiun CEO (PEN_CEO) memiliki nilai minimum atau nilai terendah sebesar 0,00 dan nilai maksimum atau nilai tertinggi sebesar 1,00. Nilai rata-rata (*mean*) pensiun CEO sebesar 0,46 yang berarti perusahaan sampel memiliki rata-rata CEO yang akan mendekati masa pensiun sebesar 0,46%

dan nilai standar deviasi sebesar 0,502 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel pensiun CEO sebesar 0,502 dari 80 jumlah observasi (N) yang digunakan.

Pada variabel konservatisme akuntansi (KSV_AKT) memiliki nilai minimum atau nilai terendah sebesar -0,0950 yang dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sedangkan nilai maksimum atau nilai tertinggi sebesar 0,6596 yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) konservatisme akuntansi sebesar 0,142030 yang berarti sebagian besar perusahaan sampel memiliki rata-rata nilai akrual positif (tidak konservatif) sebesar 0,142030% dan nilai standar deviasi sebesar 0,1404102 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel konservatisme akuntansi sebesar 0,1404102 dari 80 jumlah observasi (N) yang digunakan.

4.2. Uji Asumsi Klasik 4.2.1. Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	1,303
Asymp. Sig. (2-tailed)	,067

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Olahan SPSS 20.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa hasil uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,067 di mana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics		
	Model	Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	KOM_IND	,876	1,142	
	KEP_MAN	,956	1,046	
	GROWTH	,931	1,075	
	PEN_CEO	,825	1,213	

a. Dependent Variable: KSV_AKT Sumber: Data Olahan SPSS 20.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* pada variabel independen Proporsi Dewan Komisaris Independen (X₁) sebesar 0,876, Struktur Kepemilikan Manajerial (X₂) sebesar 0,956, *Growth Opportunity* (X₃) sebesar 0,931, dan Pensiun CEO (X₄) sebesar 0,825 sehingga nilai *Tolerance* yang diperoleh dari keempat variabel independen tersebut lebih besar dari 0,10 (*Tolerance* > 0,10). Kemudian, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel independen Proporsi Dewan Komisaris Independen (X₁) sebesar 1,142, Struktur Kepemilikan Manajerial (X₂) sebesar 1,046, *Growth Opportunity* (X₃) sebesar 1,075, dan Pensiun CEO (X₄) sebesar 1,213 sehingga nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang diperoleh dari keempat variabel independen tersebut lebih kecil dari 10 (VIF < 10). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

	Model	Sig.
1	(Constant)	,444
	KOM_IND	,148
	KEP_MAN	,900
	GROWTH	,065
	PEN_CEO	,198

a. Dependent Variable: Abs_Res Sumber: Data Olahan SPSS 20.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa hasil uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi pada variabel independen Proporsi Dewan Komisaris Independen (X_1) sebesar 0,148, Struktur Kepemilikan Manajerial (X_2) sebesar 0,900, *Growth Opportunity* (X_3) sebesar 0,065, dan Pensiun CEO (X_4) sebesar 0,198 sehingga nilai signifikansi yang diperoleh dari keempat variabel independen tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.2.4. Uji Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	,820

a. Predictors: (Constant), PEN_CEO, KEP_MAN,

GROWTH, KOM_IND

b. Dependent Variable: KSV_AKT Sumber: Data Olahan SPSS 20.

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) diperoleh sebesar 0,820 di mana nilai tersebut berada di antara angka -2 dan +2 atau secara matematis ditulis -2 < 0,820 < +2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

4.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,235	,064		3,674	,000
	KOM_IND	-,002	,002	-,134	-1,182	,241
	KEP_MA N	-,383	1,766	-,023	-,217	,829
	GROWTH	,012	,014	,097	,879	,382
	PEN_CEO	-,084	,033	-,301	-2,582	,012

a. Dependent Variable: KSV_AKT Sumber: Data Olahan SPSS 20.

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut.

KSV AKT = 0.235 - 0.002KOM IND - 0.383KEP MAN + 0.012GROWTH - 0.084PEN CEO

Pada persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,235 yang berarti apabila semua variabel independen diasumsikan bernilai konstan atau sama dengan nol, maka besar nilai variabel dependen (Konservatisme Akuntansi) adalah sebesar 0,235 satuan. Nilai koefisien regresi PEN_CEO (X₄) memiliki pengaruh negatif sebesar 0,084 yang berarti setiap kenaikan satu satuan pensiun CEO, maka akan menurunkan tingkat konservatisme akuntansi sebesar 0,084 satuan.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summarv^b

_			1:10 GOT S GITTING	J
	Model	R	R Square	Adjusted R Square
Ī	1	,398 ^a	,159	,114

a. Predictors: (Constant), PEN CEO, KEP MAN, GROWTH, KOM IND

b. Dependent Variable: KSV_AKT Sumber: Data Olahan SPSS 20.

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai $Adjusted R Square (\bar{R}^2)$ diperoleh sebesar 0,114 di mana nilai tersebut menunjukkan pengaruh variabel independen Proporsi Dewan Komisaris Independen (X_1) , Struktur Kepemilikan Manajerial (X_2) , $Growth \ Opportunity \ (X_3)$, dan Pensiun CEO (X_4) terhadap variabel dependen Konservatisme Akuntansi (Y) adalah sebesar 11,4%, sedangkan sisanya sebesar 88,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

4.4.2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 9 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df
1 Regression	3,539	,011 ^b

a. Dependent Variable: KSV_AKT

b. Predictors: (Constant), PEN_CEO, KEP_MAN, GROWTH, KOM_IND

Sumber: Data Olahan SPSS 20.

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai prob. F hitung (*sig.*) diperoleh sebesar 0,011 di mana nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang berarti Ha diterima atau H₀ ditolak. Dengan demikian, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji kelayakan model (uji F) dapat disimpulkan bahwa model regresi layak (*fit*) untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

4.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tabel 10 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		_
1	(Constant)	,235	,064		3,674	,000
	KOM_IND	-,002	,002	-,134	-1,182	,241
	KEP_MA N	-,383	1,766	-,023	-,217	,829
	GROWTH	,012	,014	,097	,879	,382
	PEN_CEO	-,084	,033	-,301	-2,582	,012

a. Dependent Variable: KSV_AKT Sumber: Data Olahan SPSS 20.

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) sebagai berikut:

- 1. Variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki nilai t hitung sebesar -1,182 dan nilai signifikansi sebesar 0,241 di mana nilai signifikansi 0,241 > α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan pada level 5% sehingga dalam penelitian ini Ha ditolak atau H_0 diterima yang berarti secara individual variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, H_1 : "Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi" tidak terdukung.
- 2. Variabel Struktur Kepemilikan Manajerial memiliki nilai t hitung sebesar -0,217 dan nilai signifikansi sebesar 0,829 di mana nilai signifikansi 0,829 > α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan manajerial tidak signifikan pada level 5% sehingga dalam penelitian ini Ha ditolak atau H₀ diterima yang berarti secara individual variabel struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, H₂: "Struktur Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi" tidak terdukung.
- 3. Variabel *Growth Opportunity* memiliki nilai t hitung sebesar 0,879 dan nilai signifikansi sebesar 0,382 di mana nilai signifikansi 0,382 $> \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *growth*

- opportunity tidak signifikan pada level 5% sehingga dalam penelitian ini Ha ditolak atau H_0 diterima yang berarti secara individual variabel *growth opportunity* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, H_3 : "*Growth Opportunity* Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi" tidak terdukung.
- 4. Variabel Pensiun CEO memiliki nilai t hitung sebesar -2,582 dan nilai signifikansi sebesar 0,012 di mana nilai signifikansi 0,012 $< \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pensiun CEO signifikan pada level 5% sehingga dalam penelitian ini Ha diterima atau H_0 ditolak yang berarti secara individual variabel pensiun CEO berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, H_4 : "Pensiun CEO Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi" terdukung.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Konservatisme Akuntansi

Hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu "Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi". Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.9, proporsi dewan komisaris independen yang diproksikan menggunakan persentase antara jumlah dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris perusahaan menunjukkan arah negatif dengan nilai koefisien beta sebesar -0,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,241 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini **tidak terdukung.**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan BUMN yang diteliti secara rata-rata telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Pasal 19 bahwa persentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara yang tertuang dalam Pasal 13 Ayat 1 bahwa dalam komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya di mana nilai rata-rata proporsi dewan komisaris independen diperoleh sebesar 40,61%. Meskipun secara rata-rata proporsi dewan komisaris independen telah memenuhi bahkan melewati batas ketentuan yang disyaratkan oleh POJK dan Permen BUMN, tetapi tetap tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Veres et al. (2013) berpendapat bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi dikarenakan fungsi pengawasan yang dijalankan terhadap direksi belum dilakukan secara optimal sebagai alat untuk mengawasi kinerja manajemen dalam menentukan konservatisme pada laporan keuangan. Selain itu, Limantauw (2012) dan Veres et al. (2013) menganggap bahwa pengangkatan dan keberadaan dewan komisaris independen dilakukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi tidak dimaksudkan untuk menciptakan situasi yang suitable dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan. Kemudian, kondisi ini dipertegas dalam hasil survei Asian Development Bank dalam Boediono (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya pengendalian dari pendiri perusahaan maupun kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena fungsi pengawasan yang semestinya menjadi tanggung jawab anggota dewan komisaris independen menjadi tidak optimal.

Koefisien regresi bertanda negatif pada variabel proporsi dewan komisaris independen menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka akan semakin rendah tingkat konservatisme akuntansi atau laba yang dihasilkan semakin tidak konservatif. Menurut penelitian oleh Limantauw (2012) menyatakan bahwa hubungan negatif antara konservatisme akuntansi dengan proporsi dewan komisaris independen dapat disebabkan karena semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka akan membuat kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir pekerjaan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen sehingga fungsi pengawasan berjalan kurang optimal yang dapat mengakibatkan kualitas laba dan kinerja perusahaan menurun.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kurang optimalnya fungsi pengawasan oleh dewan komisaris independen terhadap kinerja manajemen perusahaan diduga karena banyaknya praktik

rangkap jabatan yang seringkali ditemui dalam jabatan komisaris pada perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN (Saputri, 2020). Dalam perkembangannya, persoalan terkait praktik rangkap jabatan yang seringkali ditemui pada jabatan komisaris di BUMN tak kunjung tuntas dan kembali menuai polemik di publik bahkan hingga saat ini persoalan yang menjadi perhatian juga bertambah hingga mencakup isu-isu, seperti dominasi jajaran direksi dan komisaris yang berasal dari Bank BUMN tertentu, kompetensi komisaris yang berasal dari relawan politik, penempatan anggota TNI/Polri aktif, penempatan ASN aktif sebagai komisaris pada anak perusahaan BUMN hingga pengurus Parpol diangkat menjadi komisaris BUMN.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ombudsman RI, persoalan terkait praktik rangkap jabatan dalam rentang tahun 2016-2019 telah terdapat 397 orang penyelenggara negara/pemerintahan terindikasi rangkap jabatan pada perusahaan BUMN dan 167 orang pada anak perusahaan BUMN. Data-data tersebut masih terus diverifikasi ulang berdasarkan status keaktifannya saat ini. Dari 397 orang dimaksud, komisaris terindikasi rangkap jabatan yang berasal dari Kementerian sebanyak 254 orang (64%), Lembaga Non Kementerian sebanyak 112 orang (28%), dan Perguruan Tinggi sebanyak 31 orang (8%), serta mereka yang merangkap jabatan ini juga terindikasi rangkap penghasilan (opiniindonesia.com).

Untuk instansi asal Kementerian, terdapat lima kementerian yang mendominasi hingga 58%, yaitu Kementerian BUMN sebanyak 55 orang, Kementerian Keuangan sebanyak 42 orang, Kementerian Perhubungan sebanyak 17 orang, Kementerian PUPR sebanyak 17 orang, dan Kementerian Sekretaris Negara sebanyak 16 orang, sedangkan bagi instansi asal Lembaga Non Kementerian, 65% didominasi oleh lima instansi, yaitu TNI sebanyak 27 orang, Polri sebanyak 13 orang, Kejaksaan sebanyak 12 orang, Pemda sebanyak 11 orang, BIN sebanyak 10 orang, dan BPKP sebanyak 10 orang, dan bagi instansi asal Perguruan Tinggi, tercatat seluruhnya berasal dari 16 Perguruan Tinggi dengan terbanyak dari Universitas Indonesia sebanyak 9 orang dan Universitas Gajah Mada sebanyak 5 orang (opiniindonesia.com).

Polemik rangkap jabatan ini terus meningkat karena dipicu oleh regulasi yang membuka peluang lebih longgar untuk pengabaian etika. Pada sebelumnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS yang melarang PNS rangkap jabatan menjadi direksi dan komisaris perusahaan swasta. Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) tersebut diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS sehingga tidak ada lagi larangan lagi untuk merangkap jabatan menjadi komisaris, kecuali menjadi anggota partai politik. Logika yang berkembang kemudian adalah jika menjadi komisaris perusahaan swasta tidak dilarang, apalagi menjadi komisaris perusahaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN.

Di sisi lain adanya regulasi yang melarang praktik rangkap jabatan karena konflik kepentingan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang tertuang dalam Pasal 17 (huruf a) menyatakan bahwa pelaksana pelayanan publik termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam implementasinya, argumentasi yang sering digunakan adalah perbedaan istilah jabatan yang melekat pada penyelenggara yang digunakan sebagai alasan rangkap jabatan, bukan pada etika atau kepatutannya.

Menurut anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, pembiaran benturan regulasi tersebut telah menghasilkan ketidakpastian dalam proses rekrutmen, pengabaian etika, konflik kepentingan, diskriminasi, dan akuntabilitas yang buruk. Dalam tatanan operasional terdapat beberapa hal krusial yang berpotensi maladministrasi dalam rekrutmen komisaris BUMN, yaitu konflik kepentingan, penghasilan ganda, masalah kompetensi, jual beli pengaruh, proses yang diskriminatif, transparansi penilaian, dan akuntabilitas kinerja komisaris. Pada gilirannya hal ini jelas dapat memperburuk tata kelola, menurunkan kepercayaan publik, dan mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BUMN (opiniindonesia.com).

Ombudsman RI juga menjelaskan bahwa persoalan tersebut dapat diatasi jika terdapat peraturan yang jelas mengatur tentang penetapan kriteria calon komisaris, sumber bakal calon, tata cara penilaian dan penetapan, mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban komisaris di BUMN, dan akuntabilitas kinerja para komisaris BUMN. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi benturan regulasi akibat batasan yang tidak tegas yang dapat menyebabkan penafsiran yang berbeda dan cenderung meluas, pelanggaran terhadap regulasi yang secara eksplisit telah mengatur pelarangan rangkap jabatan (UU,

PP, dan peraturan menteri), rangkap penghasilan yang tidak didasarkan pada prinsip imbalan atas beban tambahan yang wajar dan berbasis kinerja, sistem rekrutmen komisaris BUMN yang kurang transparan dan akuntabel, serta diskriminatif bahkan sampai saat ini tidak ada publikasi tentang laporan kinerja hasil evaluasi kinerja dari para komisaris ke publik tentang bagaimana mereka diusulkan atau ditetapkan berdasarkan SK Menteri (kompas.com).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Ahmed dan Duellman (2007), Padmawati dan Fachrurrozie (2015), dan Liyanto dan Hairul Anam (2017) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Yunos *et al.* (2014), Pratanda dan Kusmuriyanto (2014), N. H. S. Dewi dan Putra (2016), dan Nasr dan Ntim (2018) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi, serta penelitian oleh Amran dan Manaf (2014) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi.

4.5.2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Konservatisme Akuntansi

Hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu "Struktur Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi". Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.9, struktur kepemilikan manajerial yang diproksikan menggunakan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insiders*) terhadap jumlah saham beredar menunjukkan arah negatif dengan nilai koefisien beta sebesar -0,383 dan nilai signifikansi sebesar 0,829 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini **tidak terdukung.**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hasil tersebut diduga karena persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial pada perusahaan BUMN yang diteliti terbilang masih sangat rendah dengan kepemilikan tidak lebih dari 0,0569% dari jumlah saham yang beredar di mana sebagian besar kepemilikan saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sehingga kebijakan perusahaan lebih banyak dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas termasuk penerapan prinsip konservatisme akuntansi.

Koefisien regresi bertanda negatif pada variabel struktur kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa semakin tinggi struktur kepemilikan manajerial, maka tingkat konservatisme akuntansi semakin rendah. Menurut Wu (2006), hubungan negatif antara konservatisme akuntansi dengan struktur kepemilikan manajerial dapat disebabkan karena manajer dengan kepemilikan ekuitas tinggi akan cenderung menerapkan tingkat konservatisme akuntansi yang rendah untuk menghindari penurunan harga saham. Apabila laba suatu perusahaan rendah, dividen yang akan diterima oleh investor menjadi kecil sehingga menyebabkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dan pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan harga saham perusahaan.

Orang dalam (*insiders*) perusahaan yang meliputi direksi, dewan komisaris, dan manajer pada perusahaan BUMN dapat dikatakan sangat berhati-hati dalam melakukan praktik manajemen laba dan beban karena kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sehingga aktivitas pengawasan terhadap pihak manajemen sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. El-Haq *et al.* (2019) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham manajerial tinggi harus lebih berhati-hati saat mengakui laba dan beban karena semakin tinggi saham yang dimiliki, maka kecenderungan pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba dan beban akan semakin tinggi pula yang akan mengakibatkan rendahnya penerapan prinsip konservatisme akuntansi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh El-Haq *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) dan Pambudi (2017) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap

konservatisme akuntansi, serta penelitian oleh Fatmariani (2013), D. N. Sari *et al.* (2014), dan Ayuningsih *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

4.5.3. Pengaruh Growth Opportunity Terhadap Konservatisme Akuntansi

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu "*Growth Opportunity* Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi". Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.9, *growth opportunity* yang diproksikan menggunakan rasio *market to book value of equity* (MBVE) menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien beta sebesar 0,012 dan nilai signifikansi sebesar 0,382 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *growth opportunity* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis ketiga pada penelitian ini **tidak terdukung.**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa *growth opportunity* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hasil tersebut diduga karena kesempatan tumbuh pada perusahaan BUMN yang diteliti menunjukkan nilai rata-rata yang masih rendah sebesar 1,7541%. Mayangsari dan Wilopo (2002) berpendapat bahwa kesempatan tumbuh suatu perusahaan yang masih rendah saat melakukan investasi terhadap hal-hal yang menguntungkan mengindikasikan perusahaan tidak konservatif. Pada dasarnya, perusahaan yang menggunakan prinsip konservatisme akan terdapat cadangan dana tersembunyi yang digunakan untuk melakukan investasi sehingga perusahaan yang konservatif identik dengan perusahaan yang tumbuh. Selain itu, tidak adanya pengaruh *growth opportunity* terhadap konservatisme akuntansi dapat disebabkan karena rendahnya kesempatan investor untuk melakukan investasi sehingga pasar akan menilai negatif atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Astarini (2011), L. P. K. Dewi *et al.* (2014), Fathurahmi *et al.* (2014), Ayuningsih *et al.* (2016), dan Savitri (2016) yang menunjukkan bahwa *growth opportunity* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Fatmariani (2013), Alfian dan Sabeni (2013), Verawaty dan Merina (2015), Agustina *et al.* (2016), dan Tazkiya dan Sulastiningsih (2020) menunjukkan bahwa *growth opportunity* berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi, serta penelitian oleh Febrianti (2018) yang menunjukkan bahwa *growth opportunity* berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

4.5.4. Pengaruh Pensiun CEO Terhadap Konservatisme Akuntansi

Hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu "Pensiun CEO Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Konservatisme Akuntansi". Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.9, pensiun CEO yang diproksikan menggunakan variabel *dummy* menunjukkan arah negatif dengan nilai koefisien beta sebesar -0,084 dan nilai signifikansi sebesar 0,012 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pensiun CEO berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis keempat pada penelitian ini **terdukung.**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pensiun CEO berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini berarti bahwa semakin CEO mendekati masa pensiun dari jabatannya, maka tingkat konservatisme akuntansi akan semakin rendah. Namun, jika dilihat berdasarkan data usia CEO yang diperoleh menunjukkan bahwa CEO yang usianya tidak mendekati masa pensiun lebih besar daripada CEO yang usianya mendekati masa pensiun dari jabatan eksekutifnya. Berikut data usia CEO berdasarkan variabel *dummy* pada 20 perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2019 sebagaimana terdapat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11 Data Usia CEO

Tahun	Usia (Variabel	Total	
	0	1	
2016	12	8	20
2017	12	8	20
2018	11	9	20
2019	8	12	20
Jumlah	43	37	80

Sumber: Data diolah, 2021.

Keterangan:

Angka 0 : CEO tidak mendekati masa pensiun (usia < 55). Angka 1 : CEO mendekati masa pensiun (usia \ge 55).

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa jumlah usia CEO yang tidak mendekati masa pensiun di mana usianya kurang dari 55 tahun (usia < 55) berjumlah 43 atau 53,75%, sedangkan sisanya sebanyak 37 atau 46,25% adalah usia CEO yang mendekati masa pensiun di mana usianya lebih dari atau sama dengan 55 tahun (usia ≥ 55). Meskipun persentase CEO yang usianya tidak mendekati masa pensiun lebih besar daripada CEO yang usianya mendekati masa pensiun dari jabatannya, variabel pensiun CEO tetap berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hasil tersebut diduga karena CEO yang usianya telah mendekati masa pensiun dinilai cenderung menyajikan laba secara berlebihan (overstated) agar bonus yang diterima semakin tinggi. Selain itu, CEO juga akan mengurangi biaya agar laba yang dihasilkan tinggi sehingga kinerja mereka akan dinilai baik oleh perusahaan. Dengan kata lain, apabila kinerja manajemen perusahaan buruk, CEO akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan dari jabatan eksekutifnya (Chen et al., 2018). Sebaliknya, apabila CEO yang usianya tidak mendekati masa pensiun dari jabatannya akan cenderung berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan sehingga menghasilkan laba yang berkualitas atau CEO yang tidak mendekati masa pensiun akan cenderung menerapkan prinsip konservatisme (Tazkiya dan Sulastiningsih, 2020). Menurut Almilia (2004), laba yang disajikan berdasarkan prinsip konservatisme akan menghasilkan laba yang berkualitas karena menghasilkan laba minimal atau laba yang nilainya tidak dibesar-besarkan (understated).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2018) dan Tazkiya dan Sulastiningsih (2020) yang menyatakan bahwa pensiun CEO berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini dikarenakan CEO yang usianya mendekati masa pensiun dari jabatan eksekutifnya akan cenderung menaikkan laba agar bonus yang mereka dapatkan semakin tinggi. Selain itu, CEO juga akan memanipulasi laba untuk meningkatkan kinerja jangka pendek sebelum mereka diberhentikan dari perusahaan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Manajerial, *Growth Opportunity*, dan Pensiun CEO Terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada variabel independen Proporsi Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Manajerial, *Growth Opportunity*, dan Pensiun CEO dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. Hal ini dibuktikan melalui pengujian signifikansi di mana nilai signifikansi diperoleh

- sebesar 0,241 atau lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak terdukung.
- 2. Struktur Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. Hal ini dibuktikan melalui pengujian signifikansi di mana nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,829 atau lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak terdukung.
- 3. *Growth Opportunity* tidak berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. Hal ini dibuktikan melalui pengujian signifikansi di mana nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,382 atau lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak terdukung.
- 4. Pensiun CEO berpengaruh negatif signifikan terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. Hal ini dibuktikan melalui pengujian signifikansi di mana nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,012 atau lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini terdukung.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam proses penelitiannya antara lain sebagai berikut:

- 1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu Proporsi Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Manajerial, *Growth Opportunity*, dan Pensiun CEO di mana kemampuannya masih sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen karena hanya memiliki nilai *Adjusted R Square* (\bar{R}^2) sebesar 0,114 atau 11,4% dan sisanya sebesar 88,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.
- 2. Metode pengukuran variabel konservatisme akuntansi hanya menggunakan metode *earnings/accrual measure* model Givoly dan Hayn yang diproksikan menggunakan ukuran akrual.
- 3. Sampel penelitian yang digunakan terbatas, yaitu hanya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 4. Periode penelitian yang digunakan masih relatif singkat, yaitu periode 2016-2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi investor dan kreditur disarankan dapat lebih cermat dalam pengambilan keputusan investasi karena hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 80 laporan keuangan perusahaan BUMN yang diobservasi, hanya terdapat 6 laporan keuangan yang konservatif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan agar lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi, seperti memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat konservatisme akuntansi.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan faktor-faktor atau variabel independen lainnya mengingat kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen (konservatisme akuntansi) hanya sebesar 0,114 atau 11,4%, sedangkan sisanya sebesar 88,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini, seperti biaya politis, *operating cash flow*, dewan komisaris, intensitas modal, komite audit, kontrak hutang (*debt covenant*), pajak, rasio *leverage*, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, risiko litigasi, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan publik, tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*), dan ukuran perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi penelitian secara lebih menyeluruh.
- 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain terkait pengaruh CEO terhadap konservatisme akuntansi yang tidak hanya diteliti berdasarkan pensiun CEO saja, tetapi juga dari pengaruh masa jabatan CEO terhadap konservatisme akuntansi sehingga dapat memberikan kontribusi penelitian secara luas.
- 4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode pengukuran lainnya pada saat mengukur variabel konservatisme akuntansi, seperti *earnings/stock returns relation measure* dan *net asset measure* sehingga dapat digunakan sebagai pembanding metode yang tepat dalam penggunaan proksi konservatisme akuntansi.

- 5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, tidak hanya terbatas pada perusahaan BUMN saja sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.
- 6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode penelitian yang relatif lebih panjang sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik dan komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta Dosen Pembimbing Utama atas waktu, bimbingan, saran, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
- 2. Ibu Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini
- 3. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan arahan, masukan, saran, dan nasihat yang membangun, serta diskusi yang bermanfaat mengenai pengetahuan untuk penyempurnaan skripsi ini.
- 4. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hendri dan Ibunda Meriyantina. Terima kasih atas semua jerih payah kalian karena telah membesarkan dan mendidik penulis tanpa lelah, serta selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa tanpa henti. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, dukungan, nasihat, dan motivasi, serta segala pengorbanan yang telah dilakukan demi tercapainya masa depan yang baik bagi penulis.
- 5. Kakak-adikku, dr. M. Azzaky Bimandama dan Nabil Drifarrel Bimandama. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan untuk menggapai cita-cita penulis. Semoga kita dapat selalu kompak sebagai saudara kandung hingga tua nanti.
- 6. Keluarga besarku tercinta yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala dukungan, nasihat, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan lancar, serta doa yang kalian berikan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis di masa depan.
- 7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Referensi

- Agustina, A., Rice, R., & Stephen, S. (2016). Akuntansi Konservatisme Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 1–16.
- Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2007). Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics:

 An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Economics*. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.01.005
- Alfian, A., & Sabeni, A. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Konservatisme Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Almilia, L. S. (2004). Pengujian Size Hypothesis dan Debt/Equity Hypothesis Yang Mempengaruhi Tingkat Konservatisme Laporan Keuangan Perusahaan dengan Teknik Analisis Multinominal Logit. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*.
- Amran, N. A., & Manaf, K. B. A. (2014). Board Independence and Accounting Conservatism in Malaysian Companies. *Procedia Social and Behavioral Sciences*. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.095
- Annisa, M. I. (2018). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Debt Covenant, Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan, dan Political Cost Terhadap Konservatisme Akuntansi.
- Astarini, D. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi. *e-Journal Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta*.
- Ayuningsih, L. D., Nurcholisah, K., & Helliana. (2016). Pengaruh Debt Covenant, Kepemilikan Manajerial, dan Growth Opportunities Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Kajian Akuntansi*, 17(2), 19–30.
- Barclay, Mi. J., & Smith, C. W. (1995). The Maturity Structure of Corporate Debt. *The Journal of Finance*. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb04797.x

- Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and The Asymmetric Timeliness of Earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 24. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(97)00014-1
- Boediono, G. S. B. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, 172(15–16), 172–194.
- Certo, S. T., Holmes Jr, R. M., & Holcomb, T. R. (2007). The Influence of People on the Performance of IPO Firms. *Business Horizons*, 50(4), 271–276.
- Chen, S., Ni, S. X., & Zhang, F. (2018). CEO Retirement, Corporate Governance and Conditional Accounting Conservatism. *European Accounting Review*. https://doi.org/10.1080/09638180.2017.1279065
- Dewi, L. P. K., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Dewi, N. H. S., & Putra, I. P. D. (2016). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Pada Integritas Laporan Keuangan. *e-Jurnal Akuntansi*.
- Dewi, N. K. S. L., & Suryanawa, I. K. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Financial Distress Terhadap Konservatisme Akuntansi. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 223–234.
- Djuitaningsih, T., & Marsyah, W. A. (2012). Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *Media Riset Akuntansi*.
- El-Haq, Z. N. S., Zulpahmi, Z., & Sumardi, S. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Growth Opportunities, dan Profitabilitas Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 315–328.
- Fathurahmi, A., Sukarmanto, E., & Fadilah, S. (2014). Pengaruh Growth Opportunities dan Financial Distress Terhadap Conservatism Accounting Pada Perusahaan Textile dan Garmen yang Terdaftar di BEI 2010-2014. *Prosiding Penelitian Civitas Akademika Unisba (Sosial dan Humaniora)*.
- Fatmariani. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Debt Covenant, dan Growth Opportunities Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal*.
- Febrianti, F. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Growth Opportunities, dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Givoly, D., & Hayn, C. (2000). The Changing Time Series Properties of Earnings, Cash Flows, and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative? *Journal of Accounting and Economics*. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(00)00024-0
- Givoly, D., & Hayn, C. (2002). Rising Conservatism: Implications for Financial Analysis. *Financial Analysts Journal*. https://doi.org/10.2469/faj.v58.n1.2510
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen (Edisi 1). In *BPFE*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D., Wiecek, I. M., & McConomy, B. J. (2019). *Intermediate Accounting, Volume 2*. John Wiley & Sons.
- KNKG. (2008). Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. In *Komite Nasional Kebijakan Governance*.
- Lafond, R., & Roychowdhury, S. (2008). Managerial Ownership and Accounting Conservatism. *Journal of Accounting Research*. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00268.x
- Limantauw, S. (2012). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Sebagai Mekanisme Good Corporate Govenance Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, *1*(1), 48–52.
- Liyanto, L. W., & Hairul Anam. (2017). Proporsi Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi.

- Jurnal GeoEkonomi ISSN-Elektronik (e): 2503-4790 | ISSN-Print (p): 2086-1117.
- Marselina, L., & Sebrina, N. (2014). Analisis Perbedaan Tingkat Konservatisme Akuntansi Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2009 dan 2012-2013). *Wahana Riset Akuntansi*, 4(1), 673–690.
- Mayangsari, S., & Wilopo. (2002). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*.
- Nasr, M. A., & Ntim, C. G. (2018). Corporate Governance Mechanisms and Accounting Conservatism: Evidence from Egypt. *Corporate Governance (Bingley)*. https://doi.org/10.1108/CG-05-2017-0108
- Noviantari, N. W., & Ratnadi, N. M. D. (2015). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Pada Konservatisme Akuntansi. *e-Jurnal Akuntansi*, 11(3), 646–660.
- Ohlson, J. A., & Feltham, G. A. (1995). Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. *Contemporary Accounting Research*.
- Oktomegah, C. (2012). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, *1*(1).
- Padmawati, I., & Fachrurrozie, F. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi. *Accounting Analysis Journal*. https://doi.org/10.15294/aaj.v4i1.7810
- Pambudi, J. E. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Debt Covenant Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.109
- Pangestuti, R. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Financial Distress, dan Tingkat Utang Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018).
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang *Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas*
- Pratanda, R. S., & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Likuiditas, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Konservatisme. *Accounting Analysis Journal*. https://doi.org/ISSN 2252-6765
- Rohim, A. A., & Puspita, H. E. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan Terhadap Konservatisme Akutansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 43.
- Saputri, M. A. (2020). Pengaruh Mekanisme GCG Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan BUMN.
- Sari, D. N., Yusraliani, & L, A. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Institutional, Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Publik, Debt Covenant, dan Growth Opportunities Terhadap Konservatisme Akuntansi. *JOM Fekon*.
- Sari, M. R., & Rahayu, S. (2014). Analisis Pengaruh Independensi Auditor, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit, dan Manajemen Laba Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*.
- Savitri, E. (2016). Konservatisme Akuntansi: Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris, dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.
- Seswanto, H. (2012). Pengaruh Konservatisme Terhadap Kualitas Laba Dengan Pendekatan Accounting Based dan Market Based. *Journal of Financial Economics*, 80, 385–417.
- Sriwedari, T. (2012). Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mediasi*, 4(01), 78–88.
- Sudana, I. M., & Aristina, N. P. N. (2017). Chief Executive Officer (CEO) Power, CEO Keluarga, dan

- Nilai IPO Premium Perusahaan Keluarga di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 21(2), 219–231.
- Sugiarto. (2009). Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan, dan Informasi Asimetri. In *Graha Ilmu, Yogyakarta*.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In *Metodelogi Penelitian*.
- Tazkiya, H., & Sulastiningsih. (2020). Pengaruh Growth Opportunity, Financial Distress, CEO Retirement Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2017). *Jurnal Kajian Bisnis*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Verawaty, V., & Merina, C. (2015). Insentif Pemerintah (Tax Incentives) dan Faktor Non Pajak Terhadap Konservatisme Akuntansi Perusahaan Perbankan di Indonesia.
- Veres, M., Darmadji, S. H., & Sutanto, A. C. (2013). Hubungan Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Konservatisme Akuntansi di Industri Perbankan Indonesia Periode 2009-2011. *Calyptra*, 2(1), 1–17.
- Wardhani, R. (2008). Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak (23-24 Juli)*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Watts, R. L. (2003). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. *Accounting Horizons*. https://doi.org/10.2308/acch.2003.17.3.207
- Widayati, E. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan Terhadap Konservatisma Akuntansi. *Doctoral Disertation Universitas Diponegoro*.
- Wu, S. (2006). *Managerial Ownership and Earnings Quality*. Working Paper. Sauder School of Business University of British Columbia.
- Yunos, R. M., Ahmad, S. A., & Sulaiman, N. (2014). The Influence of Internal Governance Mechanisms on Accounting Conservatism. *Procedia Social and Behavioral Sciences*. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.138
- Zelmiyanti, R. (2014). Perkembangan Penerapan Prinsip Konservatisme Dalam Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*. https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043

https://beritagar.id/

https://bisnis.tempo.co/

https://industri.kontan.co.id/

https://opiniindonesia.com/

https://www.kompas.com/

www.cnnindonesia.com/

www.idx.co.id